

INTISARI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) GABUNGAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Oleh:

Rezty Dhany Yustitiyani¹, Sutanto²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan terhadap penyelenggaraan tugas Notaris di Kabupaten Jayawijaya, dan (2) Mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat tugas Majelis Pengawas daerah di Kabupaten Jayawijaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didasarkan pada data primer lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Provinsi Papua. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah *probability sampling*. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode berpikir induktif

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) pengawasan yang di lakukan kepada Notaris yang berada di kabupaten jayawijaya dilakukan menggunakan penggunaan preventef dimana pengawasan dilakukakn pada saat pemeriksaan dilakukan di kantor Notaris, pemeriksaan dilakukan sebanyak 1(satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dimana faktor-faktor penghambat ini dibedakan menjadi dua *pertama*, faktor eksternal yaitu akses wilayah yang sulit dijangkau dilihat dari keadaan geografis Kabupaten Jayawijaya yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan jalur udara sehingga menghambat jika ingin dilakukan pengawasan, *kedua*, faktor internal yaitu: keterbatasan dana dimana dana yang dianggarkan oleh APBN yang diberikan kepada MPD Gabungan Provinsi Papua tidak dapat mengakomodir unutm melakukan pengawasan di seluruh kabupaten yang ada di provinsi papua. Tidak terdapatnya kantor secretariat MPD sehinga mempersulit jika ingin melakukan pertemuan pertemuan yang bersifat rahasia. Kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan SDM ini terjadi jika para anggota MPD tidak dapat melakukan tugasnya dikarnakan setiap anggota memiliki kesibukan sendiri-sendiri.

Kata Kunci: Majelis Pengawah Daerah, Notaris, Pengawasan dan Pembinaanx

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

SUPERVISION AND DEVELOPMENT OF NOTARY BY REGIONAL FEDERATION SUPERVISORY BOARD IN JAYAWIJAYA DISTRICT

Oleh:

Rezty Dhany Yustitiyani³, Sutanto⁴

This study aims to find out and analyze: (1) Supervision and Development of the Regional Supervisory Board (MPD) Combined with the implementation of Notary duties in Jayawijaya Regency, and (2) Knowing what are the obstacles to the task of the Regional Supervisory Board in Jayawijaya Regency.

This research is empirical legal research based on primary data on the field or on the community. This study requires primary data as the main data in addition to secondary data. The subjects in this study were the Regional Supervisory Assembly (MPD) of the Papua Province. The sampling technique used is probability sampling. The analysis method used in this research is qualitative thinking methods and conclusions using inductive thinking methods

Based on the results of the study it can be concluded that: 1) the supervision carried out to a Notary in jayawijaya district is carried out using preventive use where supervision is carried out when the inspection is carried out in the Notary's office, the inspection is carried out in 1 (one) year. 2) inhibiting factors where the inhibiting factors are divided into the first two, external factors, namely access to difficult-to-reach areas seen from the geographical situation of Jayawijaya Regency which can only be reached by using airways so that it is hampered if you want supervision, second, internal factors, namely: limited funds where funds budgeted by the APBN given to the Joint MPD of the Papua Province cannot accommodate supervision in all districts in the province of Papua. There was no MPD secretariat office so it was difficult to want to hold a confidential meeting. Lack of human resources, this human resource limitation occurs if MPD members cannot perform their duties because each member has his or her own busy life.

Keywords: Regional Councils, Notaries, Supervision and Coachingx

³ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada